1. Nama Unit Organisasi : Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi
2. Tugas : melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perhubungan, informatika dan komunikasi.
3. Fungsi :
   a. penyusunan program kerja di bidang perhubungan, informasi dan komunikasi;
   b. perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan, informasi dan komunikasi;
   c. penyelenggara urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan, informasi dan komunikasi;
   d. pembinaan, bimbingan teknis, pengawasan dan pengendalian teknis dan pelaksanaan kegiatan di bidang perhubungan, informasi dan komunikasi;
   e. penanggung jawab pelaksanaan kegiatan di Dinas;
   f. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana serta ketatausahaan Dinas;
   g. pemberian rekomendasi perijinan bidang perhubungan, informasi dan komunikasi;
   h. pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan UPTD dan kelompok jabatan fungsional ; dan
   i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Indikator Kinerja Utama :

No	Uraian	Sumber data
1.	Jumlah penumpang semua moda angkutan umum dalam setahun (orang)	Primer
2.	Persentase sarana prasarana LLAJ dalam kondisi baik (%)	Primer
3.	Persentase kendaraan wajib uji yang telah	Primer

	dilakukan uji kendaraan (%)	
4.	Persentase kendaraan yang layak jalan (%)	Primer
5.	Jumlah kasus kecelakaan lalu lintas (kasus)	Sekunder
6.	Jumlah lembaga komunikasi masyarakat (radio) yang aktif	Primer
7.	Jumlah warung internet (unit)	Primer
8.	Jumlah SKPD yang memiliki SDM berkeahlian teknologi informasi	Primer
9.	Jumlah SKPD yang telah memiliki jaringan internet	Primer
10.	Jumlah website/blog resmi SKPD yang aktif	Primer
11.	Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota (SPM Perhubungan)	Primer
12.	Tersedianya angkutan umum melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kabupaten/Kota (SPM Perhubungan)	Primer
13.	Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek (SPM Perhubungan)	Primer
14.	Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek (SPM Perhubungan)	Primer

15.	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrill) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota (SPM Perhubungan)	Primer
16.	Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji (SPM Perhubungan)	Primer
17.	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada Kabupaten/Kota yang telah memiliki terminal (SPM Perhubungan)	Primer
18.	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten/Kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor (SPM Perhubungan)	Primer
19.	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRLL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir pada Kabupaten/Kota (SPM Perhubungan)	Primer
20.	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum (SPM Perhubungan)	Primer
21.	Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota (SPM Perhubungan)	Primer
22.	Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional Melalui: (SPM Komunikasi dan Informasi) a. Media massa seperti majalah, radio, dan	Primer

	televisi; b. Media baru seperti website (media online); c. Media tradisional seperti pertunjukan rakyat; d. Media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi. dan lokakarya; dan/ atau e. Media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan baliho.	
23.	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan (%)(SPM Komunikasi dan Informasi)	Primer
24.	Jumlah arus penumpang angkutan umum (orang) (Permendagri Nomor 54 Tahun 2010)	Primer
25.	Rasio ijin trayek (Permendagri Nomor 54 Tahun 2010)	Primer
26.	Jumlah uji KIR angkutan umum (Permendagri Nomor 54 Tahun 2010)	Primer
27.	Jumlah terminal bus (Permendagri Nomor 54 Tahun 2010)	Primer
28.	Cakupan angkutan darat (%)(Permendagri Nomor 54 Tahun 2010)	Primer
29.	Cakupan kepemilikan KIR angkutan umum (%)(Permendagri Nomor 54 Tahun 2010)	Primer
30.	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) (Permendagri Nomor 54 Tahun 2010)	Primer
31.	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum (Permendagri Nomor 54 Tahun 2010)	Primer

32.	Persentase pemasangan rambu-rambu (%)(Permendagri Nomor 54 Tahun 2010)	Primer